



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUAIDY**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI**
3. NHK : **123546**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.596.418.875</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 323 m2/359 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.319.268.875		
2. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA SITUBONDO, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/45 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 349.650.000		
4. Bangunan Seluas 20.98 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 507.500.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>512.950.000</b>
1. MOBIL, TOYOTA INNOVA G A/T DSL/KUN40RGKPDN Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000		
2. MOTOR, HONDA X1H02N35M1 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 16.450.000		
3. MOTOR, HONDA L1K02033L1 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 26.500.000		
4. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER 1.5L ULTIMATE-L 4X2 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>498.430.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>180.911.723</b>



F. HARTA LAINNYA	Rp.	500.000.000
Sub Total	Rp.	5.288.710.598
III. HUTANG	Rp.	286.313.708
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.002.396.890

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.